



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/VII /2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU NOMOR 188.45/01/KPTS/I/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAB. MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi AKIP Kemenpan RB tahun 2024 dan demi perbaikan kedepan untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran strategis pemerintah, perlu disusun revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada poin (a) dan poin (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Mamuju;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2016);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor 188.45/01/KPTS/1/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024.
- Kesatu** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor 188.45/01/KPTS/1/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Dinas,



HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
NIP : 19680928 200604 2 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;
2. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju ;
3. Masing – Masing yang bersangkutan;
4. **A r s i p**;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Mamuju
 Nomor : 188.45/ 15 /KPTS/ VII/2024
 Tanggal : 31 Juli 2024

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 - 2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
			2024	2025	2026				
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	700	707	714	Jumlah Realisasi Investasi X 100% Target Investasi Persentase Nilai Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1 Tahun	Eselon II
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90.36	90.37	90.38	Nilai Skor IKM Definisi Opearsonal IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Tahun	Eselon II

Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	A	Ada/Tidak Predikat Akuntabilitas Instansi Pemerintah diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Predikat akuntabilitas ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: 1. AA (Sangat Memuaskan): Nilai > 90 – 100 2. A (Memuaskan): Nilai > 80 – 90 3. BB (Sangat Baik): Nilai > 70 – 80 4. B (Baik): Nilai > 60 – 70 5. CC (Cukup): Nilai > 50 – 60 6. C (Kurang): Nilai > 30 – 50 7. D (Sangat Kurang): Nilai 0 – 30	Hasil Nilai Evaluasi dari Inspektorat	1 Tahun	Eselon II
---	---------------	----------	----	----	---	---	---------------------------------------	---------	-----------

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Dinas



HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c

NIP : 19680928 200604 2 002

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 – 2026**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN				FORMULASI / Definisi Operasional	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
				2024	2025	2026				
1	Terciptanya Tdlim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi	Persen	700	707	714	Jumlah Realisasi Investasi X 100% Target Investasi Persentase Nilai Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 Bulan	Eselon III
2	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah peningkatan investor	Investor	51	59	65	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Definis Opearional Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA)	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 Bulan	Eselon III
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun berjalan X 100% Target Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Definisi operasional Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah keseluruhan Jumlah izin yang terbit melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	Data Laporan Perizinan	12 Bulan	Eselon III

							Target jumlah perizinan dan Non perizinan yang dimaksud adalah Jumlah target Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang sudah ditetapkan pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	50	Jumlah perizinan + non perizinan + LKPM yang dimonev X 100% jumlah total Target Pengawasan Definisi Operasional Jumlah Perizinan, Non Perizinan dan LKPM adalah seluruh jumlah NIB yang terdapat pada aplikasi OSS baik resiko tinggi, menengah tinggi dan Rendah yang ada di wilayah Kab. Mamuju Definisi Operasional Target Pengawasan adalah Jumlah target Perizinan, Non Perizinan dan LKPM yang diawasi Pada Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Eselon III
5	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan data base perizinan dan non perizinan	Persen	100	100	100	Jumlah laporan yang tersedia X 100% Jumlah Laporan (12 Laporan) Definisi Operasional Laporan database Perizinan dan Non Perizinan adalah seluruh data perizinan dan non perizinan setiap bulan yang diambil / ditarik datanya dari baik dari aplikasi OSS, Sicantik dan Simbg.	Laporan Data DPMPTSP	12 Bulan	Eselon III
6	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Realisasi kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah X 100% Jumlah Kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah Definisi Operasional Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Seluruh kegiatan rutin yang mendukung Pemerintah Daerah dalam hal ini di Sekretariat.	Laporan data DPMPTSP	12 Bulan	Eselon III
7	Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	Persen	100	100	100	jumlah regulasi yang tersedia X 100% Jumlah Target	Laporan data DPMPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda

							Definisi Operasional Persentase Regulasi Urusan Penanaman Modal adalah Persentase seluruh jumlah regulasi yang tersedia terkait kegiatan penanaman modal .			
8	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	1	1	Jumlah Regulasi yang tersedia Definisi Operasional Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Pemberian fasilitas /insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakatdan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakatdan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah sedangkan Penanaman Modal yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Daerah maupun penanam modal dari luar Daerah untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten	Laporan data DPMPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	Persen	100	100	100	jumlah peta potensi yang tersedia dibagi x 100% Jumlah Target Definisi Operasional Persentase Peta Potensi adalah Persentase dokumen potensi investasi (Dokumen RUPM dan Dokumen Peta Potensi)	Laporan data DPMPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	Jumlah Perda yang tersedia Definisi operasional Perda adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota Definisi Operasional Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan	Laporan data DPMPTSP	2021 s/d 2026	J Analisis Kebijakan Ahli Muda
11	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1	1	Jumlah Dokumen Peta Potensi yang tersedia		12 Bulan	

		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Definisi operasional Dokumen Peta Potensi adalah Dokumen yg disusun untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh di Daerah Kab.Mamuju dan juga potensi pengembangan berbagai sektor ekonomi Kab.Mamuju	Laporan data DPMPPTSP		Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti	Persen	33	33	33	Jumlah Promosi yang diikuti _____ x 100% Jumlah rencana promosi yang ada Definisi Operasional Persentase Promosi Investasi adalah persentase seluruh promosi baik itu pameran, workshop maupun event - event penanaman modal yang diikuti	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota Definisi Operasional Promosi Investasi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri (Investor) Adapun pada promosi ini berfokus pada : Analisis Potensi Investasi dan Perencanaan strategi promosi (penyusunan profil investasi) Perda yang mengatur promosi penanaman modal adalah Aturan - aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan daerah mengenai promosi penanaman modal	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
14	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	Persen	100	100	100	Semua Perizinan Umum yang Terlayani dengan online Definisi operasional Perizinan umum adalah seluruh izin yang terlayani secara online	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
15	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2200	2300	2400	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh NIB Definisi operasional Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda

16	Tersedianya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Keg. Usaha	110	120	130	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha Definisi Operasional pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk memonitoring seluruh jumlah kegiatan usaha yang telah atau belum memenuhi komitmen / kepatuhan berusaha	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
17	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	60	61	62	Jumlah layanan Konsultasi yang sudah ditindaklanjuti Definisi operasional Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha mengenai perizinan dan ditindaklanjuti	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
18	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Definisi operasional yang dimaksud adalah kegiatan yang memberikan fasilitas atau kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses perizinan usahanya.	Laporan data DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
19	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	85	90	100	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Definisi operasional LKPM laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala .Persentasenya didapat dari Jumlah kegiatan usaha yang dilaporkan dibagi dengan Jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM X 100%	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
20	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Keg. Usaha	9	15	15	Jumlah Kegiatan Usaha yang telah diselesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda

		dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					Definisi operasional Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat/ pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau narasumber dengan tahapan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			
21	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	266	266	266	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Definisi Opearional Kegiatan bimbingan teknis meliputi: a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan b. bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	Data Laporan Penanaman Modal	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
22	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Keg. Usaha	13	13	13	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan Definisi opearional Pengawasan adalah upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan Data Penanaman Modal	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
23	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	Persen	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah laporan yang tersedia dibagi}}{\text{target (12 laporan)}} \times 100\%$ Definisi Operasional Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan yang dimaksud adalah keseluruhan Rekap data perizinan dan non perizinan dibagi dengan 12 bulan laporan dikali 100%	Laporan Data Bidang Data/ Informasi	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
24	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,	Dokumen	12	12	12	Jumlah Dokumen yang tersedia Definisi Operasional Dokumen yang dimaksud adalah seluruh Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan yang telah direkap perbulan.	Laporan Data Bidang Data/ Informasi	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda

		Dikaji dan Dimanfaatkan								
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Ada/Tidak Definisi Operasional Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaitu Seluruh dokumen perencanaan yang tersedia dibagi jumlah dokumen perencanaan yang menjadi target Tahun berjalan.	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
26	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3	Ada/Tidak Definisi operasional Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renstra, Renja Pokok, dan Renja Perubahan	Laporan DPMPTSP	2 Bulan	Eselon IV
27	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Laporan DPMPTSP	2 Bulan	Eselon IV
28	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional RKA Perubahan adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Laporan DPMPTSP	2 Bulan	Eselon IV
29	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Laporan DPMPTSP	1 Bulan	Eselon IV
30	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional DPA Perubahan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran, dalam Pelaksanaannya mengalami berbeda dengan kondisi di lapangan sehingga membutuhkan penyesuaian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	Laporan DPMPTSP	1 Bulan	Eselon IV

31	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Laporan Lakip yang merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan DPMPPTSP	1 Bulan	Eselon IV
32	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dokumen LKPJ, LPPD, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Renja	Laporan DPMPPTSP	4 Bulan	Eselon IV
33	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Ada/Tidak Definisi operasional Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu seluruh dokumen keuangan yang tersedia dibagi dengan rencana dokumen keuangan dikali 100%	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
34	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Orang/Bulan	38	38	38	Ada/Tidak Definisi Operasional Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan sedangkan Definisi operasional Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja setiap bulan	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
35	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	4	4	4	Ada/Tidak	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Analisis Kebijakan Ahli Muda

		Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					Definisi operasional Dokumen penatausahaan adalah Dokumen dokumen yang terdiri dari dan atas 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas a) SPP-Uang Persediaan (SPP-UP); b) SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU); c) SPP-Tambahan Uang (SPP-TU); d) SPP-Langsung (SPP-LS); e) Register SPP; 2) Surat Perintah Membayar (SPM); 3) Register SPM; 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5) Register SP2D; 6) Buku Kas Umum; 7) Buku Simpanan/Bank; 8) Buku Panjar; 9) Buku Pajak/PPN/PPH; 10) Register Penutupan Kas; 11) Perincian Pengeluaran per Rincian Obyek Definisi operasional Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yaitu salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku			
36	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	2	2	2	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/semesteran adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan meliputi realisasi keuangan setiap bulan dan tiap semester.	Laporan DPMPPTSP	1 Bulan	Analisis Kebijakan Abdi Mulya
37	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dibagi target x 100% Definisi Operasional Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yaitu Persentase seluruh laporan aset yang direkap per triwulan.	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV
38	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	4	4	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah	Laporan DPMPPTSP	12 Bulan	Eselon IV

39	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	Jumlah pengadaan barang milik daerah dibagi jumlah target rencana x 100% Definisi operasional ketersediaan barang milik daerah yaitu jumlah pengadaan yang tersedia dikantor	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
40	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Definisi operasional yang dimaksud adalah pengadaan laptop/notebook, komputer/PC, printer dan mesin lainnya yang bermanfaat untuk kantor	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
41	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100	Jumlah penyediaan dokumen administrasi dibagi target x 100% Definisi operasional Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian yaitu Segala dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia dibagi target dokumen dikali dengan 100%	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
42	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	38	38	38	Jumlah ASN dan kelengkapan administrasi kepegawaian Definisi operasional Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yaitu seluruh data yang berkaitan dengan kepegawaian	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
43	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Definisi operasional Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya meliputi Dilatpim I, II, III dan IV	Laporan DPMPTSP	6 Bulan	Eselon IV
44	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	Jumlah penyediaan jasa administrasi yang ada di kantor dibagi target x100% Definisi operasional Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas meliputi penyediaan peralatan, penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang telah dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV
45	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	10	10	10	Ada/Tidak	Laporan DPMPTSP	12 Bulan	Eselon IV

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Definisi operasional Paket. Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah meliputi peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor			
46	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional Barang Cetak dan Penggandaan yaitu meliputi jilid, fotocopy, spanduk, baliho dan belnaja cetak lainnya	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
47	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	30	30	Ada/Tidak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi rapat - rapat yang dilaksanakan didalam kota maupun luar kota	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
48	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Jumlah Target Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Definisio perasional Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umumkantor, jasa surat menyurat, jasa pelayanan umumkantor, jasa peralatan dan perlengkapan X 100%	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
49	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputi Laporan tagihan air, tagihan listrik, tagihan internet, jasa konsultan IT yang tersedia	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
50	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu meliputi laporan jasa kebersihan	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
51	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	Ada/Tidak Definisi operasional Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dimaksud meliputi jasa supir dan jasa umum lainnya	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV
52	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Jumlah Target Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah X 100%	Laporan DPMPSTSP	12 Bulan	Eselon IV

							Definisi operasional persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			
53	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14	14	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara Definisi Operasional Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.	Laporan DPMPTS	12 Bulan	Eselon IV
54	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	14	Jumlah peralatan yang dipelihara Definisi operasional Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan suatu aktivitas dengan tujuan untuk menjaga agar peralatan dan mesin selalu dalam kondisi baik meliputi pemeliharaan Komputer/PC, Notebook/laptop dan AC	Laporan DPMPTS	12 Bulan	Eselon IV

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Dinas



HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c

NIP : 19680928 200604 2 002